



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KEUANGAN

TA 2023

(Audit)

PERIODE
31 DESEMBER 2023



SATKER

Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan
Barat



0561-734592



www.bawaslu-kalbarprov.go.id



@bawaslukalbar

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (686381) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum (500100) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 Kantor Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pontianak, 16 Februari 2024

Kepala Sekretariat,



Nasori, S.H., M.H.

NIP. 19710125 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	Error! Bookmark not defined.
A. 5	
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Basis Akuntansi	10
A.5. Dasar Pengukuran	10
A.6. Kebijakan Akuntansi	11
B. 16	
B.1. Pendapatan	16
B.2. Belanja	18
B.3. Belanja Pegawai	20
B.4. Belanja Barang	22
B.5. Belanja Modal	26
B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27
B.5.2. Belanja Modal Lainnya	28
C. 41	
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	29
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	30
C.3. Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	31
C.4. Peralatan dan Mesin	31

C.5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32
C.6. Aset Tetap Lainnya	32
C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
C.8. Aset Tak Berwujud	33
C.9. Aset Lain-lain	34
C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	34
C.11. Utang kepada Pihak Ketiga	35
C.15. Utang Jangka Pendek Lainnya	39
C.16. Ekuitas	40
D. 50	
D.1. Beban Pegawai	41
D.2. Beban Persediaan	42
D.3. Beban Barang dan Jasa	43
D.4. Beban Pemeliharaan	45
D.5. Beban Perjalanan Dinas	46
D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	47
D.7. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar	47
D.8. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	47
D.9. Defisit LO	49
E.1. Ekuitas Awal	50
E.2. Defisit LO	50
E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	50
E.4. Transaksi Antar Entitas	50
E.4. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	51
E.5. Ekuitas Akhir	51
F. 66	
F.1. Pengembangan Organisasi	53
F.2. <i>Automatic Adjustment</i> (Pencadangan Anggaran)	53
F.3. Rekening Pemerintah	53
F.4. Kesimpulan PIPK	55
F.5. Temuan BPK, BPKP, dan APIP	55



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Sultan Abdurrahman No 142 Pontianak
Telepon/Faximile : 0561 – 8103331
Website : www.kalbar.bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satker *Unaudited* TA 2023 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pontianak, 16 Februari 2024
Kepala Sekretariat



NASORI, SH., MH

NIP. 19710125 200502 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (686381) *Unaudited* Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.915.206 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp143.809.736.153 atau mencapai 77% dari alokasi anggaran sebesar Rp187.257.630.000. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp10.415.561.826 atau sebesar 93% dari alokasi anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp132.330.591.107 atau sebesar 76% dari alokasi anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp1.063.583.220 atau sebesar 99% dari alokasi anggarannya.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp86.520.774.465 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp68.487.542.606, Aset Tetap (neto) sebesar Rp18.033.231.859 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp9.837.971 dan Rp18,033,231,859.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp15.865.204, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp141.412.429.854, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp141.396.564.650.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional adalah sebesar Rp1.550.934 dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya adalah sebesar Rp11.499.068, sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp13.050.002.

Defisit Pos Luar Biasa sebesar Rp141.383.514.648, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp141.383.514.648.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp2.192.230.606, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp141.383.514.648 kemudian dikurangi dengan Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi sebesar Rp15.337.741 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp225.717.558.277. Akibatnya Ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp84.318.705.888 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp86,510,936,494.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk *Unaudited* TA 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	28.915.206	100	28.658.240
JUMLAH PENDAPATAN		0	28.915.206	100	28.658.240
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	11.211.795.000	10.415.561.826	77	11.023.583.762
Belanja Barang	B.4	174.966.438.000	132.330.591.107	93	34.396.890.528
Belanja Modal	B.5	1.079.397.000	1.063.583.220	76	290.019.050
JUMLAH BELANJA		187.257.630.000	143.809.736.153	99	45.710.493.340

II. NERACA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	66.047.979.560	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	176.893.536	194.332.500
Persediaan	C.3	2.262.669.510	0
Jumlah Aset Lancar		68.487.542.606	194.332.500
ASET TETAP			
Tanah	C.4	15.095.290.500	0
Peralatan dan Mesin	C.5	8.573.297.668	8.712.100.026
Gedung dan Bangunan	C.6	1.434.887.300	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.7	8.000.000	8.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.8	0	581.326.300
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.9	(7.078.243.609)	(7.303.315.086)
Jumlah Aset Tetap		18.033.231.859	1.998.111.240
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.10	40.950.000	40.950.000
Aset Lain-lain	C.11	0	134.555.960
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(40.950.000)	(166.099.589)
Jumlah Aset Lainnya		0	9.406.371
JUMLAH ASET		86.520.774.465	2.201.850.111
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	9.837.971	9.619.505
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		9.837.971	9.619.505
JUMLAH KEWAJIBAN		9.837.971	9.619.505
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	86.510.936.494	2.192.230.606
JUMLAH EKUITAS		86.510.936.494	2.192.230.606
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		86.520.774.465	2.201.850.111

III. LAPORAN OPERASIONAL

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	15.865.204	0
Jumlah Pendapatan		15.865.204	0
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	10.415.561.826	11.020.284.554
Beban Persediaan	D.3	36.870.500	29.484.0000
Beban Barang dan Jasa	D.4	78.712.403.783	20.305.611.034
Beban Pemeliharaan	D.5	1.458.146.814	660.597.110
Beban Perjalanan Dinas	D.6	49.878.157.930	13.402.906.978
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	911.289.001	1.098.403.016
JUMLAH BEBAN		141.412.429.854	46.517.286.692
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		(141.396.564.650)	(46.517.286.692)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	1.550.934	4.625.583
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		1.550.934	4.625.583
Pendapatan Non Operasional Lainnya	D.9	11.499.068	24.032.657
Beban Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		11.499.068	24.032.657
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		13.050.002	28.658.240
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.10	(141.383.514.648)	(46.488.628.452)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	2.192.230.606	3.075.248.983
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(141.383.724.077)	(86.531.460.519)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(15.337.741)	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3	(15.337.741)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	225.717.558.277	45.605.610.075
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.5	84.318.705.888	(883.018.372)
EKUITAS AKHIR	E.6	86.510.936.494	2.192.230.606

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/ 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/ 2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/ 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/ 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/ 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/ 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/ 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/ 2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi.
21. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02 /XII/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
22. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Triwulan III Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.
23. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP-DIPA-115.01.2.686381/2023 Tanggal 30 November 2022.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dipimpin oleh Kepala Sekretariat, dalam melaksanakan tugas Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
2. Pemberian dukungan administratif dan teknis Operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
3. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan; perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
4. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepiluan;
6. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
7. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat mempunyai wewenang:

1. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
2. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
3. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan

4. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi.
Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi.

Sejalan dengan **Visi** Bawaslu 2020 – 2024 “*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*”, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat ikut melaksanakan **Misi** Bawaslu berupa:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan Kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; dan
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 Kabupaten/Kota yaitu :

Tabel 1
Daftar Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Nama Kabupaten
1	Set. Bawaslu Kota Pontianak
2	Set. Bawaslu Kabupaten Kubu Raya
3	Set. Bawaslu Kabupaten Mempawah
4	Set. Bawaslu Kota Singkawang
5	Set. Bawaslu Kabupaten Sambas
6	Set. Bawaslu Kabupaten Bengkayang
7	Set. Bawaslu Kabupaten Landak
8	Set. Bawaslu Kabupaten Sanggau
9	Set. Bawaslu Kabupaten Sekadau
10	Set. Bawaslu Kabupaten Melawi
11	Set. Bawaslu Kabupaten Sintang
12	Set. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu
13	Set. Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
14	Set. Bawaslu Kabupaten Ketapang

Sedangkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari tiga satker, yaitu:

No	Kode Satker	Nama Satker	Kewenangan
1	686381	Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	KD
2	686509	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ketapang	KD
3	419661	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu	KD

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Laporan

Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan tingkat Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk diRealisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata

setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang

Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak delapan kali dengan keterangan sebagai berikut:

1. Revisi ke-1 pada tanggal 23 Desember 2022 yaitu revisi terkait *automatic adjustment* (pencadangan anggaran);
2. Revisi ke-2 pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu revisi terkait revisi POK dan ralat Halaman III DIPA;
3. Revisi ke-3 pada tanggal 13 April 2023 yaitu revisi terkait revisi POK dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan pergeseran anggaran dalam satu Rincian Output;
4. Revisi ke-4 pada tanggal 3 Juli 2023 yaitu revisi terkait realokasi anggaran;
5. Revisi ke-5 pada tanggal 27 Juli 2023 terkait Relaksasi Anggaran Automatic Adjustment sebagai langkah pemenuhan kekurangan Belanja Pegawai pada Belanja Operasional 001 dan 002;
6. Revisi ke-6 pada tanggal 16 September 2023 terkait Pergeseran anggaran dari BA BUN ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka Pemenuhan kebutuhan kegiatan Prioritas Nasional dalam rangka Pengawasan Pemilu Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2023;
7. Revisi ke-7 pada tanggal 11 November 2023 terkait Optimalisasi anggaran Automatic Adjustment Dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Operasional Pegawai (001) dan Belanja Operasional Barang (002); dan
8. Revisi ke-8 pada tanggal 27 Desember 2023 terkait pergeseran anggaran dalam satu komponen untuk memenuhi kebutuhan belanja dan melakukan pemuktahiran data revisi POK.

Perubahan rincian anggaran Tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Rincian Anggaran Tahun 2023

Uraian	2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja:		

Belanja Pegawai	9.283.379.000	8.449.597.000
Belanja Barang	128.438.304.000	153.033.752.000
Belanja Modal	1.048.637.000	1.247.748.000
Jumlah Belanja	138.770.320.000	162.731.097.000

Realisasi
Pendapatan
Rp28.915.206

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.915.206 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Rincian Estimasi & Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1.550.934	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	15.865.204	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	168	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	11.498.900	-
Jumlah	0	28.915.206	-

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.915.206, merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari :

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN dengan mekanisme penjualan lelang senilai Rp1.550.934 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak sesuai Risalah Lelang Nomor 349/53/2023 tanggal 6 Juni 2023. Hasil lelang telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN: F74C60N9VR8V8UNC.

2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp15.865.204 merupakan Pengembalian Jasa Giro dari Rekening Dana Pemilu (RDP) Bulan Januari sd Desember 2023 yang sudah disetor ke kas Negara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengembalian Bunga Bank / Jasa Giro RDP Bawaslu Prov Kalbar (Bank BRI) sebesar Rp45.456 dengan NTPN: 357403CIFBF12FL1;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 sebesar Rp145.014 dengan NTPN: 626CD6U8ELS11S3B;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 sebesar Rp1.282.499 dengan NTPN: 51BC01JNFMDOKR39;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 22 Desember 2023 sebesar Rp569.564 dengan NTPN: 5205E48VV650TB74;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 sebesar Rp698.942 dengan NTPN: 6FDF81JNFMDRMCV9;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 sebesar Rp1.734.080 dengan NTPN: 638E51JNFMDRMU9V;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 29 Desember 2023 sebesar Rp152.049 dengan NTPN: 1887A7QLUGEKM9D2;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 29 Desember 2023 sebesar Rp10.373.166 dengan NTPN: 56C2355DF0NFFAKB;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 sebesar Rp757.651 dengan NTPN: 7E5B42G4VH0AA81S;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sekadau per 29 Desember 2023 sebesar Rp106.783 dengan NTPN: AC5AF61QUR9RUKIA.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp168 yang merupakan potongan Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2022 sd Maret 2023 an Afida Laili Nuri W dkk 5 orang 10 Jiwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SPP No. 00195T tanggal 01 April 2023.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp11.498.900 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak disetor ke Kas Negara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengembalian lebih SBM Penginapan pada Perjadin ke Kec. Lembah Bawang an. Abdul Haris sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp50.000 dengan NTPN: 812D16U8EKQVRIT
 - Pengembalian lebih bayar uang saku fullboard Jabar & Taksi PNK-Bandara pada Perjadin Pengelolaan Surat Arsip di Bogor an Sophia sesuai LHAO No.

0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp90.000 dengan NTPN: 6D5C87QLUFDBCRU6

- Pengembalian lebih bayar uang harian tanggal 9 Juni 2015 pada saat menjadi moderator kegiatan implementasi pendidikan pengawasan an. Sri Hastuti sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp370.000 dengan NTPN: C7A943CIFAHDBS9T
- Pengembalian honor moderator pada RDK Monev Program tanggal 26 Mei 2015 an. Victorianus sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp665.000 dengan NTPN: 643507QLUFDBD110
- Pengembalian lebih bayar kegiatan RDK Bimtek Terpadu tanggal 16 Desember 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp900.000 dengan NTPN: C37F02G4VFFV0VS0I
- Pengembalian lebih bayar transport dalam kota peserta kegiatan Bimtek Kerjasama Bidang H2AL tanggal 13-15 Nov 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp3.470.000 dengan NTPN: A69CD0N9VQQ85S1O
- Selisih bukti pertanggungjawaban TUP yang tidak diperoleh sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp1.999.200 dengan NTPN: 0A11E6U8EKQV0S4F
- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadiin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak pada Bulan November 2022, pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadiin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Bali pada Bulan Desember 2022, pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadiin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak bulan Desember 2022 an. Zulita sebesar Rp1.804.700 dengan NTPN: B8DD548VV570UCPQ
- Pengembalian Belanja Keg. Perdin yang tidak sesuai ketentuan/kelebihan/duplikasi sesuai LHP No 18a/HP/XIV/03/2010 tgl 29 Mar 2010 no TP 2.2.4 sebesar Rp2.150.000 dengan NTPN: F6C073CIFBCF4CGF

Realisasi pendapatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.550.934	4.625.583	(66,47)

Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	15.865.204	0	100
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	168	82	104,87
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	11.498.900	10.000	1.149,89
Jumlah	28.915.206	4.635.665	144,47

Realisasi Belanja
Rp143.809.736.153

B.2. Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp143.809.736.153 atau 77% dari Anggaran Belanja sebesar Rp187.257.630.000. Realisasi Belanja Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada TA 2023 seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni. Rincian anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	11.211.795.000	10.415.561.826	93
Belanja Barang	174.966.438.000	132.330.591.107	76
Belanja Modal	1.079.397.000	1.063.583.220	99
Total	187.257.630.000	143.809.736.153	77

Berikut adalah perbandingan Realisasi Belanja pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan 2022.

Tabel 7
Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Belanja Pegawai	10.415.561.826	11.023.583.762	-5,52
Belanja Barang	132.330.591.107	34.396.890.528	284,72
Belanja Modal	1.063.583.220	290.019.050	266,73
Jumlah	143.809.736.153	45.710.493.340	214,61

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 214,61%. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 dimulai adanya tambahan anggaran prioritas nasional untuk menunjang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 serta mendukung jajaran Pengawas Adhoc di tingkat kecamatan meliputi honorarium dan biaya operasional.

Rekapitulasi Belanja Negara sebesar Rp143.809.736.153 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Bruto sebesar Rp152.488.690.981 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp8.678.954.828.

Pengembalian sebesar Rp8.678.954.828 merupakan pengembalian belanja tahun anggaran yang berjalan yang terdiri dari:

1.	Belanja Pegawai (RM) sebesar	Rp	44.167.988
2.	Belanja Barang (RM) sebesar	Rp	8.634.786.840
Jumlah		Rp	8.678.954.828

Rincian pengembalian belanja sebagai berikut:

Tabel 8
Pengembalian Belanja Per 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	582
2	511151	Belanja Tunjangan umum PNS	2.880.000
3	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	41.287.406
4	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	72.962.528
5	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.436.000
6	521211	Belanja Bahan	1.180.745.984
7	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	84.900.000
8	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	585.866.269
9	522111	Belanja Langganan Listrik	115.261.454
10	522113	Belanja Langganan Air	36.281.788
11	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.000.000
12	522141	Belanja Sewa	328.809.280
13	522191	Belanja Jasa Lainnya	86.400.000
14	524111	Belanja Perjalanan Biasa	470.455.568
15	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.437.049.059
16	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	192.618.910
Total			8.678.954.828

*Realisasi Belanja
Pegawai
Rp10.415.561.826*

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.415.561.826 atau sebesar 9% dari Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp11.211.795.000. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus

sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.626.958.000	1.234.162.077	75,86
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	8.268.053.000	8.229.163.600	99,53
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	210.920.000	37.707.152	17,88
Belanja Lembur	29.520.000	0	0
Beban Tunjangan Khusus & Beban Pegawai Transito	1.076.344.000	958.696.985	89,07
Total Belanja Kotor	11.211.795.000	10.459.729.814	93,29
Pengembalian Belanja Pegawai		(44.167.988)	
Total	11.211.795.000	10.415.561.826	92,90

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.415.561.826 dan Rp11.023.583.762 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	728.172.600	827.878.514	-12,04
Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.590	15.135	-10,21
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	26.687.850	31.805.490	-16,09
Belanja Tunjangan Anak PNS	6.943.852	7.754.087	-10,45
Belanja Tunjangan Struktural PNS	48.100.000	55.930.000	-14,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	59.301.000	65.712.000	-9,76
Belanja Tunjangan PPh PNS	68.610.085	67.271.217	1,99
Belanja Tunjangan Beras PNS	32.951.100	37.803.240	-12,84
Belanja Uang Makan PNS	228.987.000	235.169.000	-2,63
Belanja Tunjangan Umum PNS	34.395.000	42.140.000	-18,38
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	8.229.163.600	8.757.235.100	-6,03
Belanja Gaji Pokok PPPK	23.732.000	0	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	232	0	100
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.373.200	0	100

Belanja Tunjangan Anak PPPK	474.640	0	100
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.320.000	0	100
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.738.080	0	100
Belanja Uang Makan PPPK	5.069.000	0	100
Belanja Uang Lembur	0	6.418.000	(100)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	936.071.275	902.172.201	3,76
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	22.625.710	0	100
Jumlah Belanja Kotor	10.459.729.814	11.037.303.984	-5,23
Pengembalian Belanja Pegawai	(44.167.988)	(13.720.222)	221,92
Jumlah Belanja Pegawai	10.415.561.826	11.023.583.762	-5,52

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 5,52% dari Tahun Anggaran 2022. Penurunan Belanja Pegawai disebabkan karena per tanggal 30 September Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Bawaslu Kapuas Hulu masih menjadi satu DIPA dengan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.415.561.826 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Gaji PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
2. Pembayaran Tunjangan Struktural Bulan Januari s.d. Desember 2023;
3. Pembayaran Uang Makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
4. Pembayaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bulan Januari s.d. Desember 2023;
5. Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu. Bawaslu Provinsi. dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2023;
6. Pembayaran Tunjangan Kinerja PNS Bulan Januari s.d. Desember 2023;
7. Pembayaran THR PNS Tahun 2023; dan
8. Pembayaran THR Uang Kehormatan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Sementara terdapat Pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp44.167.988 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11
Pengembalian Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023

No	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
1	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	582
2	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	2.880.000
2	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	41.287.406
		TOTAL	44.167.988

Belanja Pegawai sebesar Rp10.415.561.826 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Pegawai Bruto sebesar Rp10.459.729.814 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp44.167.988. Pengembalian belanja senilai Rp44.167.988 merupakan potongan pembayaran Kekurangan Gaji PNS Angkatan 2021 senilai Rp582. Pengembalian Uang Kehormatan Ketua/Anggota senilai Rp41.287.406. dan Pengembalian Kelebihan Honorarium BPP dan PPK senilai Rp2.880.000 dengan rincian sebagai berikut:**

1. Potongan atas Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Maret sd April 2023 an Dheana Putri Ginardi dkk 3 orang pegawai Sekretariat Bawaslu Prov Kalimantan Barat berdasarkan SPP No. 00529T tanggal 23 Mei 2023 senilai Rp2
2. Potongan atas Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Februari sd Juni 2023 an Budiyanto dkk 4 orang pegawai Sekretariat Bawaslu Prov Kalimantan Barat berdasarkan SPP No.00788T tanggal 25 Juli 2023 senilai Rp580
3. Pengembalian Uang Kehormatan Ketua Bawaslu Sekadau Bulan Juli 2023 an Nur Soleh dengan NTPN F05057N8Q1BIRVSS senilai Rp11.112.943
4. Pengembalian Uang Kehormatan Anggota Bawaslu Kabupaten Landak Bulan Juli 2023 an Yovianus Jupriono Ikoniko dengan NTPN AFD23520AHK8U6M7 senilai Rp10.078.260
5. Pengembalian Uang Kehormatan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkayang Bulan Juli 2023 an Yopi Cahyono dengan NTPN EBC920JSRCLDS900 senilai Rp10.097.010.
6. Pengembalian Uang Kehormatan Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara Bulan Juli 2023 an Dahlia dengan NTPN 4BCCD2CNR1PTM754 senilai Rp9.999.193.

Belanja Barang
Rp132.330.591.107

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp132.330.591.107 atau 80,57% dari Anggaran Belanja Barang sebesar Rp174.966.438.000. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut :

Tabel 12

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	10.636.312.000	8.558.719.415	80,47
Belanja Barang Non Operasional	69.206.085.000	59.752.982.691	86,34
Belanja Persediaan	40.000.000	39.078.500	97,70
Belanja Jasa	17.325.976.000	15.180.377.060	87,62
Belanja Pemeliharaan	2.269.392.000	1.434.887.300	63,23

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75.488.673.000	55.978.281.467	74,15
Jumlah Belanja Kotor	174.966.438.000	140.965.377.947	80,57
Pengembalian Belanja Barang		(8.634.786.840)	(100)
Total	174.966.438.000	132.330.591.107	75,63

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp85.550.748.201 dan Rp14.070.077.657. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 75,63% dari Realisasi Tahun Anggaran 2022.

Tabel 13
Perbandingan Belanja Barang per 30 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	8.558.719.415	12.785.558.088	-33,06
Belanja Barang Non Operasional	59.752.982.691	3.711.709.433	1.509,85
Belanja Barang Persediaan	39.078.500	29.484.000	32,54
Belanja Jasa	15.180.377.060	3.808.974.919	298,54
Belanja Pemeliharaan	1.455.938.814	660.597.110	117,21
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55.978.281.467	13.402.906.978	317,66
Jumlah Belanja Kotor	140.965.377.947	34.399.230.528	309,79
Pengembalian Belanja Barang	(8.634.786.840)	(2.340.000)	368.907,98
Jumlah Belanja	132.330.591.107	34.396.890.528	284,72

Belanja Barang sebesar Rp132.330.591.107 merupakan hasil pengurangan dari Realisasi Belanja Barang Bruto sebesar Rp140.965.377.947 dikurangi Pengembalian Belanja Barang sebesar Rp8.634.786.840. Adapun rincian Pengembalian Belanja Barang sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Pengembalian Belanja Barang

No	Kode	Rincian	Jumlah (Rp)
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	72.962.528
2	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	33.436.000
3	521211	Belanja Bahan	1.180.745.984
4	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	84.900.000
5	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	585.866.269
6	522111	Belanja Langganan Listrik	115.261.454
7	522113	Belanja Langganan Air	36.281.788
8	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.000.000
9	522141	Belanja Sewa	328.809.280

10	522191	Belanja Jasa Lainnya	86.400.000
11	524111	Belanja Perjalanan Biasa	470.455.568
12	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.437.049.059
13	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	192.618.910
Total			8.634.786.840

Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran sebesar Rp72.962.528 merupakan pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan Rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Honorarium Koorsek Bawaslu Kab. Sambas bulan Oktober 2023 (1 bulan) dengan NTPN: D397F7NAMJPMNOVI senilai Rp3.352.000;
2. Pengembalian Honorarium Korsek Bawaslu Kab. Sanggau bulan September dan Oktober 2023 an. Syukur dengan NTPN: AB0696QT6P7AAP2L senilai Rp6.704.000;
3. Pengembalian Honorarium PNS DPK Bawaslu Kab. Kayong Utara bulan Oktober 2023 (1 orang, 1 bulan) dengan NTPN: 01F27522742HGP11 senilai Rp1.120.000;
4. Kelebihan LS BPJS Ketenagakerjaan dengan NTPN: EC34A7NAMJPMNK1E senilai Rp3
5. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Pontianak dengan NTPN 96546451QN51D7MI senilai Rp3.172.100
6. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp1.864.600
7. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp7.711.400
8. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Singkawang dengan NTPN 4561B1GAB7DSDN59 senilai Rp1.245.300
9. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Bengkayang dengan NTPN 4D19F1GAB7DS8B5H senilai Rp7.814.502
10. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sambas dengan NTPN 3514E5UDQC9VG550 senilai Rp19.058.473

11. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Landak dengan NTPN C1FC45UDQC9PTNTC senilai Rp13.300
12. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp279.550
13. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Melawi dengan NTPN BBA4F45IQN518J7A senilai Rp3.912.000
14. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sintang dengan NTPN B324645IQN50LINO senilai Rp15.886.200
15. Pengembalian sisa dana Belanja Keperluan Perkantoran pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp829.100

Pengembalian Belanja Bahan sebesar Rp1.180.745.984 merupakan pengembalian Belanja Bahan dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Pontianak dengan NTPN 9654645IQN51D7MI senilai Rp10.777.000 dan senilai Rp36.545.450
2. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp4.360.406 dan senilai Rp24.596.700
3. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp54.040.200 dan senilai Rp2.711.600
4. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Singkawang dengan NTPN 4561B1GAB7DSDN59 senilai Rp2.106.040 dan senilai Rp19.957.330
5. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Bengkayang dengan NTPN 4D19F1GAB7DS8B5H senilai Rp5.811.220 dan senilai Rp12.030.701

6. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sambas dengan NTPN FE78E45IQN51HAKS senilai Rp108.120.300 dan NTPN 3514E5UDQC9VG550 senilai Rp780.000 dan senilai Rp129.081.940
7. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Landak dengan NTPN C1FC45UDQC9PTNTC senilai Rp50.245.000
8. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp15.071.500 dan senilai Rp210.777.060
9. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sekadau dengan NTPN 307A10JUNV99D3GE senilai Rp3.195.917 dan senilai Rp149.055.120
10. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Melawi dengan NTPN BBA4F45IQN518J7A senilai Rp4.208.000 dan senilai Rp10.994.950
11. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sintang dengan NTPN B324645IQN50LINO senilai Rp204.642.100 dan senilai Rp110.361.300
12. Pengembalian sisa dana Belanja Bahan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp3.312.900 dan senilai Rp7.963.250

Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp84.900.000 merupakan pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Pontianak dengan NTPN 9654645IQN51D7MI senilai Rp5.100.000 dan senilai Rp2.100.000
2. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp6.900.000
3. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN 6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp7.500.000

4. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Singkawang dengan NTPN 4561B1GAB7DSN59 senilai Rp3.000.000
5. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Bengkayang dengan NTPN 4D19F1GAB7DS8B5H senilai Rp8.100.000 dan senilai Rp900.000
6. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sambas dengan NTPN FE78E45IQN51HAKS senilai Rp15.000.000 dan NTPN 3514E5UDQC9VG550 senilai Rp900.000
7. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Landak dengan NTPN C1FC45UDQC9PTNTC senilai Rp5.100.000
8. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp7.200.000 dan senilai Rp11.100.000
9. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Melawi dengan NTPN BBA4F45IQN518J7A senilai Rp4.200.000
10. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sintang dengan NTPN B324645IQN50LINO senilai Rp1.500.000
11. Pengembalian sisa dana Belanja Honor Output Kegiatan pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp5.400.000
12. Pengembalian kelebihan pembayaran honor PNS Panwascam Bln November TA 2022 dengan NTPN 4AF4C5UDQ39653RS senilai Rp900.000

Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp585.866.269 merupakan pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp22.155.123
2. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp7.655.000 dan senilai Rp16.845.750

3. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN 6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp2.465.000 dan senilai Rp26.180.761
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp6.853.445 dan senilai Rp30.000.000
5. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Bengkayang dengan NTPN 4D19F1GAB7DS8B5H senilai Rp3.000.000 dan NTPN 18B7B8JM9S1225JP senilai Rp10.000.000 dan senilai Rp26.943.820
6. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Sambas dengan NTPN FE78E45IQN51HAKS senilai Rp4.682.000 dan NTPN 3514E5UDQC9VG550 senilai Rp74.640.836
7. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Landak dengan NTPN C1FC45UDQC9PTNTC senilai Rp18.250.000 dan senilai Rp6.267.411
8. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp135.690.000 dan senilai Rp8.007.112
9. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Melawi dengan NTPN BBA4F45IQN518J7A senilai Rp50.000 dan senilai Rp27.638.355
10. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sintang dengan NTPN B324645IQN50LINO senilai Rp141.500.000 dan senilai Rp14.162.656
11. Pengembalian sisa dana Belanja Barang Non Operasional Lainnya pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp1.500.000 dan senilai Rp754.000

Pengembalian Belanja Langganan Listrik sebesar Rp115.261.454 merupakan pengembalian Belanja Langganan Listrik dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp9.497.655

2. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023 dengan NTPN C05FF2CPNKE26V2U senilai Rp8.238.682
3. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 29 Desember 2023 dengan NTPN EC19C45KN9IR0VKG senilai Rp6.136.235
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp5.648.811
5. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 dengan NTPN 6B4AB2CPNKE270LI senilai Rp15.297.000
6. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 27 Desember 2023 dengan NTPN A28080JUNV8M9B6I senilai Rp32.850.760
7. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 22 Desember 2023 dengan NTPN DE8A77NAMJQJC3LQ senilai Rp560.600
8. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp1.782.211
9. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 dengan NTPN 6BFA18JO6EE5UC39 senilai Rp28.462.000
10. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Melawi per 22 Desember 2023 dengan NTPN A10FA0JUNV7G43TC senilai Rp5.861.500
11. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 dengan NTPN 3E45D7NAMJQ9QR2Q senilai Rp926.000

Pengembalian Belanja Langganan Air sebesar Rp36.281.788 merupakan pengembalian Belanja Langganan Air dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp4.031.700
2. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023 dengan NTPN C05FF2CPNKE26V2U senilai Rp461.200
3. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 29 Desember 2023 dengan NTPN EC19C45KN9IR0VKG senilai Rp1.433.500
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp1.745.962
5. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 dengan NTPN 6B4AB2CPNKE270LI senilai Rp3.093.175

6. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 27 Desember 2023 dengan NTPN A28080JUNV8M9B6I senilai Rp14.817.101
7. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp674.050
8. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 dengan NTPN 6BFA18JO6EE5UC39 senilai Rp10.025.100

Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp10.000.000 merupakan pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya dari Panwascam seKabupaten Sanggau yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp10.000.000.

Pengembalian Belanja Sewa sebesar Rp328.809.280 merupakan pengembalian Belanja Sewa dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Pontianak dengan NTPN 9654645IQN51D7MI senilai Rp10.000.000
2. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp5.950.000
3. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN 6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp32.700.000 dan senilai Rp1.450.000
4. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Singkawang dengan NTPN 4561B1GAB7DSN59 senilai Rp4.100.000 dan senilai Rp600.000
5. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Bengkayang dengan NTPN 4D19F1GAB7DS8B5H senilai Rp34.050.000 dan senilai Rp18.059.280
6. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sambas dengan NTPN FE78E45IQN51HAKS senilai Rp37.350.000 dan NTPN 3514E5UDQC9VG550 senilai Rp2.000.000 dan senilai Rp4.200.000
7. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Landak dengan NTPN C1FC45UDQC9PTNTC senilai Rp25.550.000
8. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp64.300.000
9. Pengembalian dana adhoc Panwaslu Sekadau Hilir Sekadau Hulu Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan NTPN 761E65UDQCCD2CV4 senilai Rp9.700.000

10. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Melawi dengan NTPN BBA4F45IQN518J7A senilai Rp36.500.000
11. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sintang dengan NTPN B324645IQN50LINO senilai Rp26.250.000 dan senilai Rp7.350.000
12. Pengembalian sisa dana Belanja Sewa pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp8.700.000

Pengembalian Belanja Jasa Lainnya sebesar Rp86.400.000 merupakan pengembalian Belanja Jasa Lainnya dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp3.000.000
2. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023 dengan NTPN C05FF2CPNKE26V2U senilai Rp9.000.000
3. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 29 Desember 2023 dengan NTPN EC19C45KN9IR0VKG senilai Rp5.050.000
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp8.000.000
5. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 dengan NTPN 6B4AB2CPNKE270LI senilai Rp1.700.000
6. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 27 Desember 2023 dengan NTPN A28080JUNV8M9B6I senilai Rp27.200.000
7. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 22 Desember 2023 dengan NTPN DE8A77NAMJQJC3LQ senilai Rp5.800.000
8. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp16.800.000
9. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Melawi per 22 Desember 2023 dengan NTPN A10FA0JUNV7G43TC senilai Rp2.350.000
10. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 dengan NTPN 3E45D7NAMJQ9QR2Q senilai Rp7.500.000

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp470.455.568 merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp6.595.000
2. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023 dengan NTPN C05FF2CPNKE26V2U senilai Rp25.651.500
3. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 29 Desember 2023 dengan NTPN EC19C45KN9IR0VKG senilai Rp14.470.000
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp50.050.050
5. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 dengan NTPN 6B4AB2CPNKE270LI senilai Rp14.844.608
6. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 27 Desember 2023 dengan NTPN A28080JUNV8M9B6I senilai Rp80.132.912
7. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 22 Desember 2023 dengan NTPN DE8A77NAMJQC3LQ senilai Rp3.146.800
8. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp77.635.600
9. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 dengan NTPN 6BFA18JO6EE5UC39 senilai Rp48.535.532
10. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Melawi per 22 Desember 2023 dengan NTPN A10FA0JUNV7G43TC senilai Rp127.971.324
11. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 dengan NTPN 3E45D7NAMJQ9QR2Q senilai Rp20.167.142
12. Pengembalian tahun berjalan TUP 7 atas kelebihan pembayaran perjalanan dinas Bawaslu Kabupaten Kubu Raya dengan NTPN 92A4645IQN8971Q8 senilai Rp855.000

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp5.437.049.059 merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp337.719.000

2. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kubu Raya per 29 Desember 2023 dengan NTPN C05FF2CPNKE26V2U senilai Rp364.072.769
3. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 29 Desember 2023 dengan NTPN EC19C45KN9IR0VKG senilai Rp115.961.000
4. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 dengan NTPN 481B98JO6ECM7RMH senilai Rp8.690.000
5. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 dengan NTPN 6B4AB2CPNKE270LI senilai Rp874.497.085
6. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 27 Desember 2023 dengan NTPN A28080JUNV8M9B6I senilai Rp1.625.414.000
7. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 22 Desember 2023 dengan NTPN DE8A77NAMJQC3LQ senilai Rp775.005
8. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 dengan NTPN 7AAA51GC7PR2M9M5 senilai Rp192.094.200
9. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 dengan NTPN 6BFA18JO6EE5UC39 senilai Rp809.765.000
10. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Melawi per 22 Desember 2023 dengan NTPN A10FA0JUNV7G43TC senilai Rp1.016.116.000
11. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 dengan NTPN 3E45D7NAMJQ9QR2Q senilai Rp91.945.000

Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota sebesar Rp22.861.000 merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota dari Panwascam yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Dana Kecamatan pada RDP Bawaslu Kota Pontianak per 29 Desember 2023 dengan NTPN 15F4E45KN9IR10H8 senilai Rp7.396.000
2. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kubu Raya dengan NTPN 44E177N8Q1EJ1HSA senilai Rp4.450.000
3. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Mempawah dengan NTPN 6298C5UDQC9PV2C4 senilai Rp11.920.000 dan senilai Rp22.909.000
4. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKota Singkawang dengan NTPN 4561B1GAB7DSDN59 senilai Rp2.511.000 dan senilai Rp1.355.000

5. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sambas dengan NTPN FE78E45IQN51HAKS senilai Rp72.000 dan senilai Rp13.175.000
6. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Sanggau dengan NTPN 063757N8Q1EHNJ96 senilai Rp 3.708.000 dan senilai Rp4.164.000
7. Pengembalian sisa dana Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota pada rekening RDP kecamatan Bawaslu seKabupaten Kayong Utara dengan NTPN 94C961GAB7DRBKV1 senilai Rp200.000 dan senilai Rp120.750.000
8. Pengembalian dana adhoc Panwaslu Sekadau Hilir Sekadau Hulu Nanga Taman Kabupaten Sekadau dengan NTPN 761E65UDQCCD2CV4 senilai Rp8.910

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.330.591.107 seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pembinaan Pelaksanaan Penanganan. Penindakan Pelanggaran;
2. Rakor/Raker/Sosialisasi Penindakan Pelanggaran;
3. Rakor/Raker/Sosialisasi Penindakan Pelanggaran melalui daring;
4. Fasilitasi Pembinaan SDM di Bidang Penyelesaian Sengketa;
5. Rakor/Rakernis Peningkatan SDM di Bidang Penyelesaian Sengketa;
6. Rakor/Raker/Sosialisasi Penyelesaian Sengketa melalui daring;
7. Persiapan/Pembinaan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
8. Rakor/Raker Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif melalui daring;
9. Fasilitasi. Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi;
10. Rapat Pemutakhiran Data;
11. Rakor/Raker/Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas;
12. Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
13. Rakor/Raker/Perencanaan Program dan Anggaran melalui Daring ;
14. Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu;
15. Pembinaan Implementasi Peraturan Bawaslu dan Produk Hukum Non Peraturan Bawaslu;
16. Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu ;
17. Rakor/Raker/Sosialisasi Pembinaan Aparatur Pengawas melalui daring;
18. Rakor/Raker Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Partisipatif;

19. Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Verifikasi Faktual Partai Politik;
20. Rakor/Raker/Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui daring;
21. Rakor/Raker/Sosialisasi Penindakan Pelanggaran;
22. Pembinaan Penanganan Pelanggaran;
23. Rakor/Raker/Sosialisasi Pembinaan Penanganan Pelanggaran melalui daring;
24. Fasilitasi Pembinaan SDM di Bidang Penyelesaian Sengketa;
25. Rakor/Raker/Rakernis Peningkatan SDM Penyelesaian Sengketa;
26. Rakor/Raker/Sosialisasi Penyelesaian Sengketa melalui daring;
27. Fasilitasi. Koordinasi. dan Pelaporan Bawaslu Provinsi;
28. Publikasi dan Dokumentasi;
29. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta;
30. Penanganan Pelanggaran Tahapan Pendaftaran;
31. Penyelesaian Sengketa Tahapan Pendaftaran;
32. Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum;
33. Rapat Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan;
34. Fasilitasi Pengelolaan Kehumasan. Peliputan dan Dokumentasi;
35. Peningkatan Kapasitas Bidang Humas dan Protokol;
36. Pengelolaan *Website* dan Fasilitasi *Google Drive*;
37. Fasilitasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik;
38. Fasilitasi PPID;
39. Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Bantuan Hukum di Bawaslu Provinsi;
40. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
41. Rakor Fasilitasi Penyusunan Anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024;
42. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program;
43. Penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi;
44. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan serta Rekonsiliasi Data Keuangan;
45. Pengawasan Tahapan Logistik;
46. Pengawasan Tahapan Kampanye;
47. Pembinaan Administrasi Keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota;
48. Sosialisasi/Rakor/Raker Administrasi Keuangan bagi Bawaslu Kab/Kota;
49. Rakor/Raker/Sosialisasi Administrasi Keuangan melalui daring;
50. Implementasi Reformasi Birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
51. Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan;
52. Sosialisasi/Raker/Rakor Pengelolaan Ketatausahaan; dan
53. Kearsipan bagi Bawaslu Kab/Kota.

Belanja Modal
Rp1.063.583.220

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.063.583.220 atau sebesar 98.53% dari Anggaran Belanja sebesar Rp1.079.397.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 15

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.079.397.000	1.063.583.220	98.53
Total	1.079.397.000	1.063.583.220	98.53

Anggaran Belanja Modal sebesar Rp1.079.397.000 seluruhnya berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM). Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.083.253.260 dan Rp290.019.050.

Tabel 16

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.063.583.220	290.019.050	266,73
Jumlah Belanja	1.063.583.220	290.019.050	266,73

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 266,73% dibandingkan Realisasi per 31 Desember 2022. Kenaikan sebesar 266,73% karena adanya kebutuhan untuk dana tahapan Pemilu Tahun 2023 yang belum terdapat pada tahun 2022.

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp1.063.583.220

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.063.583.220 dan Rp50.593.550.

Tambahkan hotel

Tabel 17

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA 2023 (Rp)	REALISASI TA 2022 (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.063.583.220	290.019.050	266,73
Jumlah Belanja	1.063.583.220	290.019.050	266,73

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.063.583.220 tersebut terdiri dari belanja pada Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

per 31 Desember 2023

Nama Barang	Nomor SPK	Nilai
Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat		
12 Unit Laptop	099/PL.03.01/KN/05/2023	Rp178.221.600
3 Unit Laptop	116/PL.03.01/KN/05/2023	Rp44.455.500
3 Unit Printer	121.B/PL.03.01/KN/05/2023	Rp14.402.250
12 Unit Printer	138/PL.03.01/KN/06/2023	Rp57.609.000
2 Unit Scanner	121.B/PL.03.01/KN/05/2023	Rp28.638.000
12 Unit LCD Projector/Infocus	110/PL.03.01/KN/05/2023	Rp80.586.000
1 Unit LCD Projector/Infocus	116/PL.03.01/KN/05/2023	Rp1.637.250
12 Unit Alat Perekam Suara (Voice pen)	110/PL.03.01/KN/05/2023	Rp24.309.000
12 Unit Focusing Screen/Layar LCD Projector	110/PL.03.01/KN/05/2023	Rp19.647.000
1 Unit Focusing Screen/Layar LCD Projector	116/PL.03.01/KN/05/2023	Rp6.715.500
6 Unit Meja Kerja Kayu	59/PL.03.01/KN/03/2023	Rp9.823.500
6 Unit Kursi Besi/Metal	71/PL.03.01/KN/04/2023	Rp6.409.320
12 Unit Kamera	158.A/PL.03.01/KN/06/2023	Rp99.433.800
5 Unit PC	166/PL.03.01/KN/07/2023	Rp55.611.000
5 Unit Laptop	186.A/PL.03.01/KN/08/2023	Rp109.224.000
Konstruksi Renovasi Atap Bangunan serta pengecatan pada ruangan	217/PL.03.02/KN/08/2023	Rp77.664.000

Paket renovasi dan pembangunan pos security serta pengecatan pagar gedung Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	217/PL.03.02/KN/08/2023 248/PL.03.02/KN/09/2023	Rp116.496.000
12 unit pengeras suara utk 12 kabkota	110/PL.03.01/KN/05/2023 00545T	Rp124.542.000
1 Ac dan 1 Lemari	SPM 01555T	Rp8.158.500
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp1.063.583.220

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.5.2. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Tabel 19
Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI TA 2023 (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan terhadap realisasi dari Belanja Modal Lainnya pada Tahun Anggaran 2023.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp66.047.979.560

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp66.047.979.560 dan Rp0. Kas Lainnya merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang berasal dari saldo LS-Bendahara, Pajak, Hibah, serta saldo Lain-lain, sedangkan Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023

Keterangan	Nilai (Rp)
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	66.047.979.560
Jumlah	66.047.979.560

Saldo Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah sebesar Rp66.047.979.560 terdiri dari saldo Rekening Dana Hibah Gubernur Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILGUB KALBAR per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2VH9CG6A senilai Rp28.200.120.000
2. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILKOT PONTI per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2NEHX59A senilai Rp2.400.000.000
3. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL UTK PILBUP KBRY per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 23L494BA senilai Rp341.255.000
4. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP MEMPAWAH per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 21JH8UGA senilai Rp2.300.015.600
5. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILKOT SINGKWG per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2NALYDZA senilai Rp2.259.334.800
6. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP BENGKYG per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2R93MYDA senilai Rp3.800.000.000
7. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP LANDAK per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 27Y95CRA senilai Rp4.180.903.360
8. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP SANGGAU per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2SXFYVQA senilai Rp5.995.164.800
9. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP SEKADAU per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 22EGPNHA senilai Rp900.000.000
10. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP SINTANG per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 2D2G1ELA senilai Rp8.636.000.000

11. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL PILBUP MELAWAI per 31 Desember 2023 dengan Nomor Registrer 2MNB3Y8A senilai Rp4.400.000.000
12. Saldo Rekening Dana Hibah RPL042 PDHL UTK PILBUP KAYUT per 31 Desember 2023 dengan Nomor Register 249ZE3EA senilai Rp2.635.186.000.

C.2. Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar di
Muka
Rp176.893.536

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp176.893.536 dan Rp194.332.500. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) pada 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) - Sewa Gedung Kantor	176.893.536	194.332.500
Jumlah	176.893.536	194.332.500

Belanja Barang yang Dibayar Dimuka merupakan sisa saldo Sewa Gedung Kantor di Bawaslu Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Bengkayang serta Sewa Sarpras Gakkumdu Kabupaten Sintang. Rincian Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp176.893.536 terdapat pada **Lampiran I**.

Persediaan
Rp2.262.669.510

C.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.262.669.510 dan Rp0. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Rincian. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan seperti berikut:

Tabel 22
Perbandingan Persediaan TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penanda Identitas PTPS	2.262.669.510	0
Jumlah	2.262.669.510	0

Tanah
Rp15.095.290.500

C.4. Tanah

Saldo Aset Tetap berupa Tanah per 30 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp15.095.290.500 dan Rp0. Rincian Tanah disajikan seperti berikut:

Tabel 23
Perbandingan Tanah TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tanah	15.095.290.500	0
Jumlah	15.095.290.500	0

Hibah Barang berupa Tanah seluas 2.925 meter persegi dari Pemerintah Kabupaten Melawi ke Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dengan NPHD No: 12 Tahun 2022 dan No: 1519.1/PL.03.02/SJ/10/2022 senilai Rp51.187.500 yang dapat dilihat pada **Lampiran IV**.

Peralatan dan Mesin
Rp8.573.297.668

C.5. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp8.573.297.668 dan Rp8.712.100.026. Rincian Peralatan dan Mesin disajikan seperti berikut:

Tabel 24
Perbandingan Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	8.573.297.668	8.712.100.026
Jumlah	8.573.297.668	8.712.100.026

Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25
Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023 (Rp)	8.712.100.026
Mutasi tambah:	
Pembelian P&M	869.423.220

Hibah Masuk	106.160.280
Transfer Masuk	34.500.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	127.628.886
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	1.276.514.744
Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	8.573.297.668

Mutasi transaksi penambahan berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.137.712.386 terdiri dari Pembelian Peralatan dan Mesin senilai Rp869.423.220 atas peralatan kantor, peralatan rumah tangga, alat studio, komputer unit, dan peralatan komputer. Selain itu terdiri juga dari Hibah Masuk berupa 3 Sepeda Motor dari Pemerintah Kabupaten Melawi senilai Rp106.160.280. Mutasi tambah juga berasal dari Transfer Masuk berupa firewall senilai Rp34.500.000.

Mutasi kurang sebesar Rp1.276.514.744 merupakan penghentian Aset Tetap dari penggunaannya. rincian dari Penghentian Aset dari Penggunaan dapat dilihat pada **Lampiran III**.

*Gedung dan
Bangunan
Rp1.434.887.300*

C.6. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp1.434.887.300 dan Rp0. Rincian Peralatan dan Mesin disajikan seperti berikut:

*Tabel 26
Perbandingan Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022*

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	1.434.887.300	0
Jumlah	1.434.887.300	0

Nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp1.434.887.300 terdiri dari nilai Gedung dan Bangunan senilai Rp659.401.000 dan terdiri dari Aset Tetap Revaluasi yang sudah dihapuskan, hal tersebut disebabkan karena status dari Aset tersebut dulunya adalah pinjam-pakai, namun sekarang sudah dihibahkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sehingga dihapuskan karena sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp775.486.300.

*Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp8.000.000*

C.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sama, yaitu sebesar Rp8.000.000 dan Rp8.000.000 atau dengan kata lain tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.8. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp581.326.300. Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 27
Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	0	581.326.300
Jumlah	0	581.326.300

Terdapat pengurangan terhadap saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp581.326.300. Saldo tersebut merupakan Paket Belanja Konstruksi Renovasi Atap Bangunan serta pengecatan pada ruangan senilai Rp194.160.000 yang sudah dibayar. Saldo atas renovasi gedung senilai Rp194.160.000 ini kemudian akan direklasifikasikan ke dalam akun Gedung dan Bangunan dikarenakan per 31 Desember 2023 hak milik atas bangunan Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sudah berstatus menjadi hak milik Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian dikurangi dengan Saldo Aset Tetap Lainnya senilai Rp775.486.300 yang merupakan reklasifikasi aset tetap ke gedung dan bangunan yang meliputi:

- 1) Renovasi kantor dengan NUP 1 Tahun 2020 senilai Rp95.161.000
- 2) Renovasi kantor dengan NUP 2 Tahun 2020 senilai Rp44.880.000
- 3) Renovasi kantor dengan NUP 3 Tahun 2020 senilai Rp193.400.000
- 4) Renovasi kantor dengan NUP 4 Tahun 2021 senilai Rp112.633.300
- 5) Renovasi kantor dengan NUP 1 Tahun 2022 senilai Rp67.626.000
- 6) Renovasi kantor dengan NUP 2 Tahun 2022 senilai Rp67.626.000
- 7) Renovasi kantor dengan NUP 5 Tahun 2023 senilai Rp77.664.000
- 8) Renovasi kantor dengan NUP 6 Tahun 2023 senilai Rp116.496.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp7.078.243.609)

C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp7.078.243.609) dan (Rp7.303.315.086). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.078.243.609)	(7.303.315.086)
Jumlah	(7.078.243.609)	(7.303.315.086)

Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 29

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Mutasi tambah:	
Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.041.545.863)
Penyusutan Gedung dan Bangunan	(28.697.746)
Penyusutan Jaringan	(8.000.000)
Mutasi kurang:	
Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	(7.078.243.609)

Aset Tak Berwujud
Rp40.950.000

C.10. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp40.950.000 dan Rp40.950.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Tak Berwujud	40.950.000	40.950.000
Jumlah	40.950.000	40.950.000

Saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp40.950.000 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berupa *website*. Tidak terdapat perbedaan antara nilai saldo Aset Tak Berwujud pada 31 Desember 2023 dengan nilai saldo Aset Tak Berwujud 31 Desember 2022. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada Aset Lainnya berupa Aset Tak Berwujud.

Aset Lain-lain Rp0

C.11. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp134.555.960. Aset Lain-lain pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat tersebut merupakan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikarenakan aset dalam kondisi rusak berat. Perbandingan Aset Lain-lain per tanggal 31 Desember 2023 & 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Perbandingan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	0	134.555.960
Jumlah	0	134.555.960

Terdapat selisih antara saldo per 31 Desember 2023 dengan 2022 senilai Rp134.555.960 yang merupakan penghapusan atas Aset Lain-lain dengan Dokumen Penghapusan BMN berupa selain Tanah dan/atau Bangunan pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang tertera pada **Lampiran III**. Rincian Nilai Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 32
Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 1 Januari 2023 (Rp)	134.555.960
Mutasi tambah:	
-Reklasifikasi Peralatan dan Mesin menjadi Aset Lain-lain	1.276.514.744
Mutasi kurang:	
-Reklasifikasi Aset Lainnya menjadi Aset Tetap	127.628.886
-Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.283.441.818
Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	0

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp40.950.000)

C.12. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah (Rp40.950.000) dan (Rp166.099.589). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Mutasi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
Aset Tak Berwujud (<i>website</i>)	(40.950.000)
Aset Lain-lain (penghapusan atas Aset Lain-lain)	0
Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	(40.950.000)

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp9.837.971

C.13. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.837.971 dan Rp10.921.674. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal 30 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang kepada Pihak Ketiga	9.837.971	10.921.674
Jumlah	9.837.971	10.921.674

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat per 31 Desember 2023 terdiri dari Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar senilai Rp2.090.130 atas Tagihan Belanja Internet Bulan Desember 2023 yang tertagih Bulan Januari 2024 dan senilai Rp7.747.841 atas Tagihan Belanja Listrik Bulan Desember 2023 yang tertagih Bulan Januari 2024

Ekuitas
Rp86.510.936.494

C.14. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp86.510.936.494 dan Rp2.192.230.606. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara nilai Aset sebesar Rp86.520.774.465 dan nilai Kewajiban sebesar Rp9.837.971. Rincian Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Mutasi Ekuitas

Mutasi tambah:	
Aset Lancar	68.487.542.606

Aset Tetap	18.033.231.859
Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	
Kewajiban Jangka Pendek	9.837.971
Kewajiban Jangka Panjang	0
Saldo per 30 September 2023 (Rp)	86.520.774.465

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Lainnya
Rp15.865.204

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 . Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.865.204 dan Rp0.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan seluruh penerimaan pemerintah yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan negara yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Adapun rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36

Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	15.865.204	0	100
TOTAL	15.865.204	0	100

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan TA 2022. Kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya disebabkan karena per tanggal 31 Desember 2023 Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memiliki jasa giro dari Rekening Dana Pemilu (RDP) senilai Rp15.865.204 yang sudah sepenuhnya disetor ke kas negara.

Terdapat perbedaan jumlah Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LRA dibandingkan jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO sebesar Rp13.050.002 per 31 Desember 2023. hasil mutasi pendapatan yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 37

Mutasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2023

Mutasi Tambah:	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (LRA)	28.915.206
Mutasi Kurang:	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.550.934
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	168
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	11.498.900
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2023	15.865.204

Beban Pegawai
Rp10.415.561.826

D.2 . Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.415.561.826 dan Rp11.020.284.554.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38
Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Beban Gaji Pokok PNS	728.172.600	827.878.514	-12,04
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.008	15.135	-14,05
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	26.687.850	31.805.490	-16,09
Belanja Tunjangan Anak PNS	6.943.852	7.754.087	-10,45
Belanja Tunjangan Struktural PNS	48.100.000	55.930.000	-14,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	59.301.000	65.712.000	-9,76
Belanja Tunjangan PPh PNS	68.610.085	67.271.217	1,99
Belanja Tunjangan Beras PNS	32.951.100	37.803.240	-12,84
Belanja Uang Makan PNS	228.987.000	235.169.000	-2,63
Belanja Tunjangan Umum PNS	31.515.000	42.140.000	-25,21
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	8.187.876.194	8.757.235.100	-6,50
Belanja Gaji Pokok PPPK	23.732.000	0	100
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	232	0	100
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.373.200	0	100
Belanja Tunjangan Anak PPPK	474.640	0	100
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.320.000	0	100
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.738.080	0	100
Belanja Uang Makan PPPK	5.069.000	0	100
Belanja Uang Lembur	0	6.418.000	-100

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	936.071.275	902.172.201	-100,00
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	22.625.710	0	3,76
TOTAL	10.415.561.826	11.020.284.554	-5,49

Beban Pegawai pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 5,49% dibandingkan dengan TA 2022. Tidak terdapat perbedaan jumlah Realisasi Belanja Pegawai pada LRA dibandingkan jumlah Beban Pegawai pada LO per 31 Desember 2023.

*Beban Persediaan
Rp36.870.500*

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.870.500 dan Rp29.484.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 39

Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	36.870.500	29.484.000	25,05
Jumlah Beban Persediaan	36.870.500	29.484.000	25,05

Kenaikan Beban Persediaan sebesar 25,05% dikarenakan belanja persediaan pada TA 2023 hanya ada pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan pada Bawaslu Kabupaten/Kota tidak ada Belanja Barang Persediaan.

Terdapat perbedaan jumlah Realisasi Belanja Persediaan pada LRA dibandingkan jumlah Beban Persediaan pada LO per 31 Desember 2023, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 40

Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023

Saldo Awal Persediaan	0
Belanja:	
Belanja Persediaan (LRA)	39.078.500
Reklasifikasi masuk	2.262.669.510
Saldo Akhir Persediaan:	0
Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.208.000
Barang Persediaan Konsumsi	2.262.669.510
Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023	36.870.500

rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran V**.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp78.712.403.783*

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp78.712.403.783 dan Rp20.305.611.034. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 41

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%.
Beban Keperluan Perkantoran	7.646.468.181	11.768.126.225	-35,02
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.771.000	4.521.750	-16,60
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	725.366.000	523.566.000	38,54
Beban Barang Operasional Lainnya	76.624.560	446.078.740	-82,82
Beban Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID	0	40.628.663	-100,00
Beban Bahan	6.863.310.838	2.134.615.433	221,52
Beban Honor Output Kegiatan	47.566.470.000	1.232.473.000	3759,43
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.209.020.090	344.621.000	250,83
Beban Langganan Listrik	345.164.910	241.758.740	42,77
Beban Langganan Telepon	1.953.100	3.636.976	-46,30
Beban Langganan Air	67.900.484	27.978.316	142,69
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	44.652.371	5.508.400	710,62
Beban Sewa	13.076.780.349	2.653.711.389	392,77

Beban Jasa Profesi	721.700.000	864.100.000	-16,48
Beban Jasa Lainnya	363.221.900	15.000.000	2321,48
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	993.450	-100,00
TOTAL	78.712.403.783	20.305.611.034	287,64

Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 287.64% dibandingkan dengan Tahun 2022 karena pada TA 2023 terdapat dana tahapan pemilu yang belum terdapat pada TA 2022. Terdapat perbedaan antara Beban Barang dan Jasa pada LO dengan LRA senilai Rp596.070.055 yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42

Mutasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

Mutasi Tambah:	81.064.736.291
Belanja Barang Operasional (LRA)	8.452.320.887
Belanja Barang Non-Operasional (LRA)	57.901.470.438
Belanja Jasa (LRA)	14.603.624.538
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	9.873.971
Beban Barang yang dibayar dimuka (prepaid) TA 2022 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	194.332.500
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39.078.500
Mutasi Kurang:	
Jurnal balik atas Beban Langganan Listrik Bulan Desember TA 2022 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	6.814.529
Jurnal balik atas Beban Langganan Telepon dan Internet Bulan Desember TA 2022 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	2.181.276
Jurnal balik atas Beban Langganan Air Bulan Desember TA 2022 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	623.700
Belanja Penanda Identitas PTPS	2.262.669.510
Beban Persediaan Konsumsi	36.870.500
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2.208.000
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	176.893.536
Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023	78.712.403.783

Commented [1]: minta spmb nya ke ka afida

Beban Pemeliharaan
Rp1.458.146.814

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.458.146.814 dan Rp660.597.110. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perbandingan rincian Beban Pemeliharaan antara TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 & 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.713.000	110.070.347	-64,83
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.417.225.814	550.526.763	157,43
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.208.000	0	100
TOTAL	1.458.146.814	660.597.110	151,11

Beban Pemeliharaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 151.11% dibandingkan dengan TA 2022. Hal ini disebabkan oleh semakin padatnya kegiatan terkait tahapan menjelang Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat sudah mulai melakukan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, sehingga fokus utama Kesekretariatan adalah pemeliharaan peralatan dan mesin, yang berakibat pada bertambahnya Beban Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin.

Jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan tidak sama dengan jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023 yaitu senilai Rp2.208.000. Hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 44
Mutasi Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023

Mutasi Tambah:	
Belanja Pemeliharaan (LRA)	1.455.938.814
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.208.000
Mutasi Kurang:	
	0
Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2023	1.458.146.814

Saldo Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp2.208.000 merupakan kesalahan pencatatan atas Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang seharusnya dicatat sebagai Beban Persediaan Bahan Konsumsi dalam rangka Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp49.878.157.930

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp49.878.157.930 dan Rp13.402.906.978. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perbandingan rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan sebagai berikut:

Tabel 45

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	16.826.324.305	6.380.254.562	163,72
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.178.703.935	287.280.000	9.360,70
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.568.202.690	4.253.218.138	30,92
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	304.927.000	2.482.154.278	-87,72
TOTAL	49.878.157.930	13.402.906.978	272,14

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 272.14% dibandingkan dengan TA 2022. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023 telah dilaksanakan Tahapan Pemilihan Umum, sehingga intensitas kegiatan perjalanan dinas bertambah.

Tidak Terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Perjalanan Dinas dengan jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp911.289.001*

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp911.289.001 dan Rp1.098.403.016. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 46

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	Nilai (Rp)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	887.570.424
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.348.873
591313	Beban Penyusutan Jaringan	533.333
592222	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	8.836.371
Jumlah		911.289.001

Surplus dari
Pelepasan Aset Non
Lancar Rp1.550.934

D.8. Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.550.934 dan Rp4.625.583. Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.550.934 pada tahun 2022 merupakan Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya yang didapatkan dari hasil lelang Barang Milik Negara dengan Risalah Lelang Nomor: 349/53/2023 yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan NTPN: F74C60N9VR8V8UNC. Perbandingan Rincian Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar disajikan sebagai berikut:

Tabel 47

Perbandingan Rincian Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.550.934	4.625.583	(66.47)
Jumlah	1.550.934	4.625.583	(66.47)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp11.499.068

D.9. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.499.068 dan Rp24.032.657. Adapun perbandingan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 48

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

URAIAN	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	168	82	104,88
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	11.498.900	24.032.575	-52,15
Jumlah	11.499.068	24.032.657	52.15

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp11.499.068 berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp11.499.068 dikurangi dengan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp168 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp11.498.900 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp168 yang merupakan potongan Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2022 sd Maret 2023 an Afida Laili Nuri W dkk 5 orang 10 Jiwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SPP No. 00195T tanggal 01 April 2023.

2. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp11.499.068 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak disetor ke Kas Negara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian lebih SBM Penginapan pada Perjadin ke Kec. Lembah Bawang an. Abdul Haris sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp50.000 dengan NTPN: 812D16U8EKQVRIT
- Pengembalian lebih bayar uang saku fullboard Jabar & Taksi PNK-Bandara pada Perjadin Pengelolaan Surat Arsip di Bogor an Sopia sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp90.000 dengan NTPN: 6D5C87QLUFDBCRU6
- Pengembalian lebih bayar uang harian tanggal 9 Juni 2015 pada saat menjadi moderator kegiatan implementasi pendidikan pengawasan an. Sri Hastuti sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp370.000 dengan NTPN: C7A943CIFAHDBS9T
- Pengembalian honor moderator pada RDK Monev Program tanggal 26 Mei 2015 an. Victorianus sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp665.000 dengan NTPN: 643507QLUFDBD110
- Pengembalian lebih bayar kegiatan RDK Bimtek Terpadu tanggal 16 Desember 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp900.000 dengan NTPN: C37F02G4VFFV0VS0I
- Pengembalian lebih bayar transport dalam kota peserta kegiatan Bimtek Kerjasama Bidang H2AL tanggal 13-15 Nov 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp3.470.000 dengan NTPN: A69CD0N9VQQ85S1O
- Selisih bukti pertanggungjawaban TUP yang tidak diperoleh sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp1.999.200 dengan NTPN: 0A11E6U8EKQV0S4F
- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak pada Bulan November 2022. pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Bali pada Bulan Desember 2022. pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadin biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak bulan Desember 2022 an. Zulita sebesar Rp1.804.700 dengan NTPN: B8DD548VV570UCPQ

- Pengembalian Belanja Keg. Perdin yang tidak sesuai ketentuan/kelebihan/duplikasi sesuai LHP No 18a/HP/XIV/03/2010 tgl 29 Mar 2010 no TP 2.2.4 sebesar Rp2.150.000 dengan NTPN: F6C073CIFBCF4CGF

Defisit LO
Rp141.383.514.648

D.10. Defisit LO

Defisit LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp141.383.514.648 dan Rp46.488.628.452. Rincian dari Defisit LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49
Mutasi atas Pos-pos Operasional per 31 Desember 2023

Pendapatan:	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.865.204
Beban:	
Beban Pegawai	10.415.561.826
Beban Persediaan	36.870.500
Beban Barang dan Jasa	78.712.403.783
Beban Pemeliharaan	1.458.146.814
Beban Perjalanan Dinas	49.878.157.930
Beban Penyusutan dan Amortisasi	911.289.001
Defisit Dari Kegiatan Operasional:	141.396.564.650
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.550.934
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	11.499.068
Surplus Dari Kegiatan Non-Operasional:	13.050.002
Defisit Sebelum Pos Luar Biasa:	141.383.514.648
Defisit-LO per 31 Desember 2023	141.383.514.648

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp2.192.230.606

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.192.230.606 dan Rp3.075.248.983.

Defisit LO
Rp141.383.514.648

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp141.383.514.648 dan Rp46.488.628.452. Defisit Laporan Operasional merupakan selisih antara Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp15.337.741

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Nilai Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.337.741 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp15.337.741 merupakan nilai Penyusutan Peralatan dan Mesin Hibah Barang berupa 3 Unit Kendaraan Roda 2.

Transaksi Antar Entitas
Rp225.717.558.277

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp225.717.558.277 dan Rp45.681.835.100. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga (K/L), antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN, yang terdiri dari :

Tabel 50

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2023

Transaksi Antar Entitas	2023	2022
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	143.809.736.153	45.710.493.340
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	(28.915.206)	(28.658.240)
Transfer Masuk	15.782.597.490	0
Pengesahan Hibah Langsung	66.047.979.560	0
Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	106.160.280	0
Jumlah	225.717.558.277	45.681.835.100

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp143.809.736.153 merupakan Belanja Netto yang berasal dari anggaran Rupiah Murni (RM), terdiri dari:

Tabel 51

Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain	Jumlah (Rp)
Belanja Pegawai	10.415.561.826
Belanja Barang	132.330.591.107
Belanja Modal	1.063.583.220
Jumlah	143.809.736.153

Sedangkan DDEL sebesar Rp28.915.206 merupakan Pendapatan PNBPN tahun 2023, terdiri dari:

Tabel 52

Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas lain	Jumlah (Rp)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.550.934
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	15.865.204
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	168
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	11.498.900
Jumlah	28.915.206

Saldo DDEL dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN dengan mekanisme penjualan lelang senilai Rp1.550.934 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak sesuai Risalah Lelang Nomor 349/53/2023 tanggal 6 Juni 2023. Hasil lelang telah disetorkan ke kas negara dengan nomor NTPN: F74C60N9VR8V8UNC.
2. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp15.865.204 merupakan Pengembalian Jasa Giro dari Rekening Dana Pemilu (RDP) Bulan Januari sd Desember 2023 yang sudah disetor ke kas Negara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengembalian Bunga Bank / Jasa Giro RDP Bawaslu Prov Kalbar (Bank BRI) sebesar Rp45.456 dengan NTPN: 357403CIFBF12FL1;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Kayong Utara per 22 Desember 2023 sebesar Rp145.014 dengan NTPN: 626CD6U8ELS11S3B;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sanggau per 22 Desember 2023 sebesar Rp1.282.499 dengan NTPN: 51BC01JNFMDOKR39;

- Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Mempawah per 22 Desember 2023 sebesar Rp569.564 dengan NTPN: 5205E48VV650TB74;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kota Singkawang per 22 Desember 2023 sebesar Rp698.942 dengan NTPN: 6FDF81JNFMDRMCV9;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sintang per 27 Desember 2023 sebesar Rp1.734.080 dengan NTPN: 638E51JNFMDRMU9V;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Landak per 29 Desember 2023 sebesar Rp152.049 dengan NTPN: 1887A7QLUGEKM9D2;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sambas per 29 Desember 2023 sebesar Rp10.373.166 dengan NTPN: 56C2355DF0NFFAKB;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Bengkayang per 29 Desember 2023 sebesar Rp757.651 dengan NTPN: 7E5B42G4VH0AA81S;
 - Pengembalian Jasa Giro pada RDP Bawaslu Kabupaten Sekadau per 29 Desember 2023 sebesar Rp106.783 dengan NTPN: AC5AF61QUR9RUKIA.
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp168 yang merupakan potongan Pembayaran Kekurangan Gaji PNS Bulan Desember 2022 sd Maret 2023 an Afida Laili Nuri W dkk 5 orang 10 Jiwa Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SPP No. 00195T tanggal 01 April 2023.
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp11.498.900 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak disetor ke Kas Negara pada TA 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- Pengembalian lebih SBM Penginapan pada Perjadin ke Kec. Lembah Bawang an. Abdul Haris sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp50.000 dengan NTPN: 812D16U8EKQVVRIT
 - Pengembalian lebih bayar uang saku fullboard Jabar & Taksi PNK-Bandara pada Perjadin Pengelolaan Surat Arsip di Bogor an Sopia sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp90.000 dengan NTPN: 6D5C87QLUFDBCRU6
 - Pengembalian lebih bayar uang harian tanggal 9 Juni 2015 pada saat menjadi moderator kegiatan implementasi pendidikan pengawasan an. Sri Hastuti sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp370.000 dengan NTPN: C7A943CIFAHDBS9T
 - Pengembalian honor moderator pada RDK Monev Program tanggal 26 Mei 2015 an. Victorianus sesuai LHAO No. 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 sebesar Rp665.000 dengan NTPN: 643507QLUFDBD110

- Pengembalian lebih bayar kegiatan RDK Bimtek Terpadu tanggal 16 Desember 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp900.000 dengan NTPN: C37F02G4VVFV0VS0I
- Pengembalian lebih bayar transport dalam kota peserta kegiatan Bimtek Kerjasama Bidang H2AL tanggal 13-15 Nov 2016 sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp3.470.000 dengan NTPN: A69CD0N9VQQ85S1O
- Selisih bukti pertanggungjawaban TUP yang tidak diperoleh sesuai LHAO No. 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 sebesar Rp1.999.200 dengan NTPN: 0A11E6U8EKQV0S4F
- Pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadi biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak pada Bulan November 2022. pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadi biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Bali pada Bulan Desember 2022. pengembalian kelebihan pembayaran belanja perjadi biasa dalam rangka menghadiri undangan ke Pontianak bulan Desember 2022 an. Zulita sebesar Rp1.804.700 dengan NTPN: B8DD548VV570UCPQ
- Pengembalian Belanja Keg. Perdin yang tidak sesuai ketentuan/kelebihan/duplikasi sesuai LHP No 18a/HP/XIV/03/2010 tgl 29 Mar 2010 no TP 2.2.4 sebesar Rp2.150.000 dengan NTPN: F6C073CIFBCF4CGF

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp66.047.979.560 merupakan Hibah Langsung dalam bentuk Uang selama tahun 2023. terdiri dari:

Tabel 53

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung	No. Register	Jumlah (Rp)
RPL042 PDHL PILGUB KALBAR	2VH9CG6A	28.200.120.000
RPL042 PDHL PILKOT PONTI	2NEHX59A	2.400.000.000
RPL042 PDHL UTK PILBUP KBRY	23L494BA	341.255.000
RPL042 PDHL PILBUP MEMPAWAH	21JH8UGA	2.300.015.600
RPL042 PDHL PILKOT SINGKWG	2NALYDZA	2.259.334.800
RPL042 PDHL PILBUP BENGKYG	2R93MYDA	3.800.000.000
RPL042 PDHL PILBUP LANDAK	27Y95CRA	4.180.903.360
RPL042 PDHL PILBUP SANGGAU	2SXFYVQA	5.995.164.800
RPL042 PDHL PILBUP SEKADAU	22EGPNHA	900.000.000
RPL042 PDHL PILBUP SINTANG	2D2G1ELA	8.636.000.000
RPL042 PDHL PILBUP MELAWAI	2MNB3Y8A	4.400.000.000
RPL042 PDHL UTK PILBUP KAYUT	249ZE3EA	2.635.186.000
Jumlah		66.047.979.560

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp106.160.280 merupakan nilai perolehan dari hibah barang berupa 3 unit kendaraan roda dua yang diterima oleh Satker

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari APBD Kabupaten Melawi dengan NPHD Nomor: 0158/PL.03.03/KN-07/12/2022.

Penurunan
Ekuitas
Rp84.318.705.888

E.5. Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp84.318.705.888 dan (883.018.377). rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 54

Rincian Kenaikan Ekuitas per 31 Desember 2023

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2023	2022	%
Surplus/Defisit LO	(141.383.514.648)	(46.488.628.452)	-204,13
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(15.337.741)	0	-100
Lain-lain	0	0	
Transaksi Antar Entitas	225.717.558.277	45.605.610.075	-394,93
Total	84.318.705.888	(883.018.377)	-9.651,24

Ekuitas Akhir
Rp86.510.936.494

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp86.510.936.494 dan Rp2.192.230.606 atau kenaikan sebesar 3.847,19%. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp86.510.936.494 merupakan akumulasi nilai Ekuitas Awal sebesar Rp2.192.230.606 dikurangi dengan Kenaikan Ekuitas sebesar Rp84.318.705.888.

Tabel 55

Mutasi Ekuitas per 31 Desember 2023

Saldo Awal Ekuitas	2.192.230.606
Mutasi Tambah:	
Transaksi Antar Entitas	225.717.558.277
Mutasi Kurang:	
Defisit-LO	141.383.514.648
Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi	15.337.741
Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember 2023	86.510.936.494

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengembangan Organisasi

Bawaslu Kabupaten Ketapang merupakan satuan kerja baru di Lingkungan Bawaslu sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-889/AG.05/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu Tahun Anggaran 2022. Pada 21 Februari 2022 telah dilaksanakan revisi anggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terkait pecah DIPA bagi Satker Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Pada Agustus 2022 telah dilaksanakan revisi anggaran pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terkait pecah DIPA bagi Satker Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu. Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan satuan kerja baru di Lingkungan Bawaslu sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-211/AG/AG.05/2022 Tanggal 2 Juni 2022 Perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu Tahun Anggaran 2022.

F.2. Revisi DIPA

Selama periode berjalan, Badan Pengawas Pemilu telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak enam kali dengan keterangan sebagai berikut:

1. Revisi ke 1 pada tanggal 23 Desember 2022 yaitu revisi terkait *automatic adjustment* (pencadangan anggaran);

Anggaran	Semula	Menjadi
Belanja Barang	Rp128.606.655.000	Rp128.606.655.000
Belanja Pegawai	Rp9.283.379.000	Rp9.283.379.000
Belanja Modal	Rp880.286.000	Rp880.286.000
Total	Rp138.770.320.000	Rp138.770.320.000

2. Revisi ke 2 pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu revisi terkait revisi POK dan ralat Halaman III DIPA;

Anggaran	Semula	Menjadi
Belanja Barang	Rp128.606.655.000	Rp128.606.655.000
Belanja Pegawai	Rp9.283.379.000	Rp9.283.379.000

Belanja Modal	Rp880.286.000	Rp880.286.000
Total	Rp138.770.320.000	Rp138.770.320.000

3. Revisi ke 3 pada tanggal 13 April 2023 yaitu revisi terkait revisi POK dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan pergeseran anggaran dalam satu Rincian Output;

Anggaran	Semula	Menjadi
Belanja Barang	Rp128.606.655.000	Rp128.606.655.000
Belanja Pegawai	Rp9.283.379.000	Rp9.283.379.000
Belanja Modal	Rp880.286.000	Rp880.286.000
Total	Rp138.770.320.000	Rp138.770.320.000

4. Revisi ke 4 pada tanggal 3 Juli 2023 yaitu revisi terkait realokasi anggaran.

Anggaran	Semula	Menjadi
Belanja Barang	Rp128.606.655.000	Rp124.931.332.000
Belanja Pegawai	Rp9.283.379.000	Rp9.283.379.000
Belanja Modal	Rp880.286.000	Rp1.079.397.000
Total	Rp138.770.320.000	Rp135.294.108.000

5. Revisi ke-5 pada tanggal 21 Juli 2023 yaitu revisi terkait pemotongan *automatic adjustment*.

Anggaran	Semula	Menjadi
Belanja Barang	Rp124.931.332.000	Rp128.606.655.000
Belanja Pegawai	Rp9.283.379.000	Rp8.449.597.000
Belanja Modal	Rp1.079.397.000	Rp1.079.597.000
Total	Rp135.294.108.000	Rp134.460.326.000

6. Revisi ke-6 pada tanggal 15 September 2023 yaitu revisi terkait Anggaran Belanja Tambahan. Perubahan rincian anggaran Tahun 2023 per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
Belanja:		
Belanja Pegawai	9.283.379.000	8.449.597.000
Belanja Barang	128.438.304.000	153.033.752.000
Belanja Modal	1.048.637.000	1.247.748.000
Jumlah Belanja	138.770.320.000	162.731.097.000

F.3. Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran)

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 578/PR.03.01/K1/12/2022 Perihal *Automatic Adjustment* Belanja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) hanya pada anggaran Belanja Barang Non Operasional Bagian Reguler yaitu sebesar Rp1.304.543.000.

F.4. Rekening Pemerintah

Rekening yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat per 30 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 56

Daftar Rekening BPG Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank
1	PONTIANAK	BPP 042 BAWASLU KOTA PONTIANAK	8100126863811001	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
2	KUBU RAYA	BPP 042 BAWASLU KB KUBU RAYA	8100126863811002	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
3	MEMPAAH	BPP 042 BAWASLU KB MEMPAAH	8100126863811003	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
4	SINGKAWANG	BPP 042 BAWASLU KOTA SINGKAWANG	8100126863811004	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
5	BENGKAYANG	BPP 042 BAWASLU KB BENGKAYANG	8100126863811005	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
6	SAMBAS	BPP 042 BAWASLU KB SAMBAS	8100126863811006	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
7	LANDAK	BPP 042 BAWASLU KB LANDAK	8100126863811007	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
8	SANGGAU	BPP 042 BAWASLU KB SANGGAU	8100126863811008	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
9	SEKADAU	BPP 042 BAWASLU KB SEKADAU	8100126863811009	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri

10	MELAWI	BPP 042 BAWASLU KB MELAWI	8100126863811010	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
11	SINTANG	BPP 042 BAWASLU KB SINTANG	8100126863811011	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
12	KAYONG UTARA	BPP 042 BAWASLU KB KAYONG UTR	8100126863811013	Bank Mandiri KC JKT Plaza Mandiri
13	KETAPANG	BPG 094 SEKRET BAWASLU KAB. KETAPANG	8100126865091000	Bank Mandiri KCP Ketapang
14	KAPUAS HULU	BPG 117 BAWASLU KAB KAPUAS HL	8100124196611000	Bank Mandiri KCP Kapuas Hulu

Tabel 57
Daftar Rekening RDP Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Bank
1	PROVINSI	RPL 042 PS BAWASLU KALBAR UTK RDP	007101003784303	Bank BRI KC Pontianak A. Yani
1	PONTIANAK	RPL 042 PS BAWASLU KOTA PTK UTK RDP	161601000324305	Bank BRI KCP Nusa Indah PTK
2	KUBU RAYA	RPL 042 PS BAWASLU KKR UTK RDP	161601000323309	Bank BRI KCP Nusa Indah PTK
3	MEMPAWAH	RPL 042 PS BAWASLU KAB. MPW UTK RDP	020701001003302	Bank BRI KC Mempawah
4	SINGKAWANG	RPL 042 PS BAWASLU KOTA SKW UTK RDP	008901001517307	Bank BRI KC Singkawang
5	BENGKAYANG	RPL 042 PS BAWASLU KAB. BKY UTK RDP	056701000953302	Bank BRI KCP Bengkayang
6	SAMBAS	RPL 042 PS BAWASLU KAB. SBS UTK RDP	116801000679305	Bank BRI KC Sambas
7	LANDAK	RPL 042 PS BAWASLU KAB. LDK UTK RDP	347301000228309	Bank BRI KC Ngabang
8	SANGGAU	RPL 042 PS BAWASLU KAB. SGU UTK RDP	032201001461300	Bank BRI KC Sanggau
9	SEKADAU	RPL 042 PS BAWASLU KAB. SKD UTK RDP	347401000155306	Bank BRI Unit Sekadau
10	MELAWI	RPL 042 PS BAWASLU KAB. MLW UTK RDP	116201001234308	Bank BRI KC Melawi
11	SINTANG	RPL 042 PS BAWASLU KAB. STG UTK RDP	030401001770303	Bank BRI KC Sintang

12	KAYONG UTARA	RPL 042 PS BAWASLU KKK UTK RDP	481101000187302	Bank BRI Unit Sukadana
----	--------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------

F.5. Kesimpulan PIPK

Berdasarkan PMK 17/PMK.09/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penilaian PIPK dengan hasil efektif. Sistem Pengendalian Intern, meskipun dirancang dan dilaksanakan dengan baik, tetap memiliki keterbatasan sehingga terdapat kemungkinan kesalahan terjadi dan tidak terdeteksi. Oleh karena itu, meskipun dinyatakan efektif, pengendalian tersebut hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai keandalan pelaporan keuangan.

Per tanggal 30 Desember 2023, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan belum mulai dilaksanakan. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan belum dapat dinilai.

F.6. Temuan BPK, BPKP, dan APIP

1. Berdasarkan hasil audit operasional APIP Nomor: 0060/LHAO/PI/H2PI/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 dan 2016, terdapat temuan dengan total nilai Rp144.871.558. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti senilai Rp1.175.000 pada TA 2023 per 30 Desember 2023 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran II**.
2. Berdasarkan hasil audit operasional APIP Nomor: 054/LHAO/PI/H2PI/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017 pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, terdapat temuan dengan total nilai Rp35.579.800. Dari temuan tersebut, telah ditindaklanjuti senilai Rp6.369.200 pada TA 2023 per 30 Desember 2023 dengan rincian yang dapat dilihat pada **Lampiran II**.

F.7. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat nomor 01/KU.01.00/KN/01/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, susunan Pejabat Perbendaharaan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 3 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NIP	JABATAN/ KEDUDUKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
----	------	-----	-----------------------	---

1	NASORI. SH., MH.	1971012520 05021004	Kepala Sekretariat	Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	WONDO. S.SI.	1986041520 15031004	Kepala Bagian Administrasi Provinsi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3	BUDIYANTO	1995102620 19021001	Analisis Sengketa Peradilan Provinsi	Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi 2. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Singkawang
4	SUHADI EKO PURNOMO. A.MD.	1994072520 19021001	Pengelola Keuangan Provinsi	Bendahara Pengeluaran Provinsi
5	SISKA A YUSRA. S.STP., M.S.W	1982071420 01122001	Kepala Bagian Pengawasan & Humas	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Sambas
6	INDRAWATI. SH.	1965112319 86032009	Subkoordinator Umum dan SDM	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kota Pontianak
7	SUYATMI. S.AP.	1965121219 86032027	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mempawah	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Mempawah
8	AGUSNIARTI. S.K.M.	1978080620 00122002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kubu Raya
9	MIKHAIL APUNG. A.MD.	1970041220 07011038	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkayang	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Bengkayang
10	SYUKUR. S.PD.I., M.PD.	1981100220 11011006	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sanggau	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Sanggau
11	PASKALIS RIKARDUS. A.MD., KL.	1985040520 08031003	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sekadau	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Sekadau
12	RAMLAN. SP.	1972040320 02121002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Landak	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Landak

13	WAWAN ASMULYANTO. S.SOS.	1971121320 06041005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Melawi
14	YUNUS SUKA. A.MD.	1984082320 09031005	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sintang	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Sintang
15	YUDHI DWI SEPRIYANTO. SH.. M.SI.	1975091720 00031002	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kayong Utara	Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kayong Utara
16	RAHMAT AL KAFI. S.I.P.	1990123120 20121005	Staf Pengawasan Provinsi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sambas
17	ZUBAIR. S.SOS	1993081120 20121001	Staf Humas & Hubal Provinsi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Pontianak
18	HIJRAH SAPUTRA	1981030820 05021003	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Mempawah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Mempawah
19	PONA PAULANA	1975101920 10012001	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Kubu Raya	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kubu Raya
20	APRIYASTUTI	1977042820 06042005	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Singkawang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kota Singkawang
21	ROLINA	1990123120 20121005	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Bengkayang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Bengkayang
22	LUSIA SINI	1968112619 92032005	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sanggau	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sanggau
23	PITER SANJAYA PUTRA. A.MD.	1997051720 19021001	Pengelola Keuangan Provinsi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sekadau
24	KASIANUS. SH.	1975052520 02121008	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Landak	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Landak
25	FREDRIK ANGGA PRAYOGA. A.MD.	1988050420 10011001	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Melawi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Melawi

26	SANTIONO. A.MD.	1981042020 06041009	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Sintang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sintang
27	JUANDI MANULLANG. S.I.P.	1993111120 22031001	Staf Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ketapang	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Kayong Utara